

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PERUNDINGAN BILATERAL

TAHUN 2023



**LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT PERUNDINGAN BILATERAL
DITJEN PERUNDINGAN PERDAGANGAN
INTERNASIONAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR



Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Direktorat Perundingan Bilateral menyusun Laporan Kinerja (Lapkin) yang menguraikan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja Direktur Perundingan Bilateral Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pencapaian hasil kinerja.

Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat Perundingan Bilateral disusun berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan. Kami berharap laporan ini dapat digunakan oleh berbagai pihak terkait dalam menilai kinerja Direktorat Perundingan Bilateral selama Tahun 2023 sehingga dapat menjadi pedoman monitoring dan evaluasi dalam meningkatkan kinerja di tahun berikutnya.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyusunan laporan ini, sehingga Laporan Kinerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2023 dapat selesai tepat pada waktunya

Jakarta, Desember 2023
Direktur Perundingan Bilateral

Johni Martha

RINGKASAN EKSEKUTIF

14 Perundingan Bilateral

Jumlah negosiasi perdagangan dengan negara mitra perdagangan bilateral selama tahun 2023 sebanyak 14 perundingan, yaitu: Indonesia-Canada CEPA, CTF IPEF, IB-PTA, JCM IK-CEPA, Protocol Amending IJEPA, Launching Indonesia-Peru CEPA, JCM IC-CEPA, IEU-CEPA, IEAEU-CEPA, Indonesia-Iran PTA, JCM Indonesia-Mozambik PTA, Indonesia-Mauritius PTA, Sub Committee ROO IA-CEPA, BTA Indonesia-Malaysia.

100% pelimpahan dokumen ratifikasi

Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan bilateral ke instansi yang menangani tercapai 100% dengan selesainya proses ratifikasi perjanjian Indonesia-UAE CEPA

83,13% pemahaman stakeholders

Persentase pemahaman pemangku kepentingan terkait hasil perundingan perdagangan bilateral tercapai sebesar 83,13% yang diperoleh melalui survei pemahaman pemangku kepentingan pada kegiatan Konsultasi Publik

Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Direktur Jenderal PPI memberikan mandat melalui perjanjian kinerja kepada Direktur Perundingan Bilateral. Direktorat Perundingan Bilateral mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang di forum perundingan bilateral.

Pada tahun 2023, dalam perjanjian kinerja Direktorat Perundingan Bilateral ditetapkan 2 (dua) sasaran kinerja dan 3 (tiga) indikator kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja organisasi.

Pada Tabel 1. terlihat bahwa, nilai rata-rata capaian indikator kinerja DPB Tahun 2023 adalah sebesar 133.39%. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 13.53 (tiga belas koma lima puluh tiga) % dari nilai rata-rata capaian tahun 2022 sebesar 119.86%.

Capaian kinerja Direktorat Perundingan bilateral mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan capaian indikator SANGAT BAIK, dimana seluruh nilai capaian indikator kinerja telah mencapai atau lebih dari 100%. Bahkan Capaian Indikator Kinerja 1 (IK-1) mencapai 200%, jauh berada di atas target. Target IK-1 yaitu jumlah negosiasi perdagangan dengan negara mitra perundingan bilateral sebanyak 7 perundingan dan Dit. Perundingan Bilateral pada tahun 2023 telah melaksanakan perundingan sebanyak 14 negosiasi yaitu Indonesia-Canada CEPA, CTF IPEF, Indonesia-Bangladesh PTA, JCM IK- CEPA, Protocol Amending IJEPA, Launching Indonesia Peru CEPA, JCM IC-CEPA, IEU-CEPA, IEAEU-FTA, Indonesia-Iran PTA, JCM Indonesia-Mozambik PTA, Indonesia- Mauritius PTA, Sub Committee ROO IA-CEPA, BTA Indonesia-Malaysia meskipun dalam pelaksanaannya mengalami penghematan anggaran sebesar Rp.2.300.000.000.

LAPORAN KINERJA DPB 2023

Tabel 1. Realisasasi capaian kinerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2023

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
A	Meningkatnya akses pasar barang di pasar internasional serta mengamankan kebijakan yang menjadi kepentingan nasional dari praktik perdagangan internasional yang tidak adil				
	1 Jumlah negosiasi perdagangan dengan negara mitra perdagangan bilateral	Jumlah Negosiasi (perundingan)	7	14	200
B	Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional				
	1 Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan bilateral ke instansi yang menangani	Persen	100	100	100
	2 Persentase pemahaman pemangku kepentingan terkait hasil perundingan perdagangan bilateral	Persen	83	83,13	100.16
Rata-rata capaian tahun 2023					133,39
Rata-rata capaian tahun 2022					119.86

Target IK-2 tercapai sebesar 100 %, target kinerja pelimpahan dokumen ratifikasi ke instansi terkait yang menangani telah tercapai 100 persen untuk ratifikasi Perjanjian IUAE-CEPA yang kemudian ditetapkan dengan Perpres No.43 Tahun 2023 pada tanggal 12 Juli 2023. Dengan telah ditetapkannya Perjanjian IUAE-CEPA maka perjanjian tersebut telah dapat dimanfaatkkan oleh pelaku usaha kedua negara.

Target IK-3 tercapai sebesar 100.16 % walaupun anggaran untuk pelaksanaan konsultasi publik dilakukan *adjustment* karena adanya penghematan anggaran untuk menunjang Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, DPB dapat memenuhi target kinerja persentase pemahaman pemangku kepentingan terkait hasil perundingan perdagangan bilateral dengan mengoptimalkan kegiatan dengan baik.

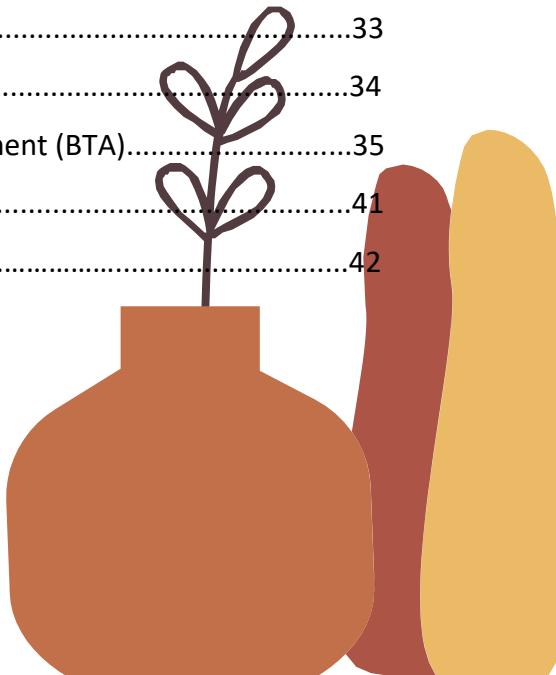
Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2023, Direktorat Perundingan Bilateral (DPB) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.700.000.000 anggaran tersebut telah digunakan untuk mendukung capaian kinerja di atas, dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.970.227.533 atau sebesar 90.52%.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Capaian Kinerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2023.....	5
Tabel 2. Kegiatan Direktorat Perundingan Bilateral.....	18
Tabel 3. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja I Tahun 2023.....	21
Tabel 4. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja II dan III Tahun 2023.....	36
Tabel 5. Kinerja Anggaran DPB tahun 2023.....	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi DPB tahun 2024	11
Gambar 2 : Perjanjian Kinerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2023.....	19
Gambar 3 : Lampiran Perjanjian Kinerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2023.....	20
Gambar 4 : Perundingan Indonesia-Canada CEPA Putaran ke-6.....	23
Gambar 5 : (CTF) Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) Putaran Keenam.....	24
Gambar 6 : Perundingan putaran ke-4 Indonesia-Bangladesh (IB-PTA).....	25
Gambar 7 : Perundingan JCM IK-CEPA.....	25
Gambar 8 : Penyelesaian Substansi Protokol Perubahan IJEPA.....	26
Gambar 9 : Peluncuran Indonesia Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement.....	27
Gambar10 : Perundingan JMC IC CEPA.....	28
Gambar11 : Perundingan IEU-CEPA Putaran ke-13.....	29
Gambar12 : Perundingan Indonesia-EAEU FTA Putaran ke-2.....	30
Gambar13 : Penandatanganan II-PTA.....	31
Gambar14 : (JCM) ke-1 Indonesia-Mozambik PTA.....	32
Gambar15 : Perundingan Indonesia – Mauritius PTA Putaran ke-4.....	33
Gambar16 : Perundingan SC ROO IA CEPA.....	34
Gambar17: Penandatanganan Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement (BTA).....	35
Gambar18 : Narasumber Konsultasi Publik.....	41
Gambar19: Konsultasi Publik.....	42



BAB I

PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada kementerian atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja merupakan suatu tahapan yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, pada bulan April 2014 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu tahapan penting dalam implementasi SAKIP adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah tahapan kegiatan SAKIP berupa penghitungan tingkat kemajuan (progress) dari pencapaian indikator kinerja strategis/program/kegiatan dibandingkan dengan tujuan/sasaran/target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja).

Kementerian Perdagangan telah menetapkan Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP di lingkungan Kementerian Perdagangan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 Tahun 2015 yang saat ini dalam proses revisi dan untuk rancangan yang baru masih belum disahkan. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794 Tahun 2015 mengamanatkan kegiatan pemantauan dan pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan diterapkan secara bertingkat mulai dari tingkat Unit Kerja Eselon II dan Satuan Kerja sampai dengan Kementerian, serta dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dengan menyampaikan Laporan Kinerja dan melampirkan Formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja. Pengukuran kinerja bukan dimaksudkan sebagai mekanisme pemberian reward and punishment, melainkan sebuah mekanisme pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja yang berfungsi untuk memberikan informasi bagi pimpinan tentang program dan kegiatan yang realisasi dan capaian kinerjanya masih dibawah target sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Selanjutnya, hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja.

LAPORAN KINERJA DPB 2023

Sesuai dengan yang tertuang dalam Permendag Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Direktorat Perundingan Bilateral mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang di forum perundingan bilateral.

Capaian kinerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2023 dapat dilihat dengan membandingkan hasil realisasi yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun 2023 di dalam kontrak perjanjian kinerja Direktorat Perundingan Bilateral.

Pada tahun 2023, dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Perundingan Bilateral ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran organisasi serta menjadi dalam penyusunan program kerja dan anggaran.

Dalam rangka meningkatkan akses pasar di forum perundingan bilateral, Indonesia telah memperkuat perannya yang berorientasi pada penjajakan pengembangan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Free Trade Agreement (FTA), Preferential Trade Agreement (PTA), terutama dengan negara-negara nontradisional.

Perundingan perdagangan bilateral yang telah disepakati dan diimplementasikan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, untuk itu Direktorat Perundingan Bilateral juga melakukan konsultasi publik bersama pelaku usaha untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang hasil-hasil perjanjian perdagangan bilatarel Indonesia dengan negara mitra, yang pada akhirnya hasil perjanjian tersebut dapat bermanfaat secara maksimal bagi pelaku usaha dan perkembangan perekonomian Indonesia.

TUJUAN

Tujuan dari disusunnya Laporan Kinerja adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Oleh karena itu pelaporan kinerja instansi pemerintah sebagai perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab (obligation to answer) tentang apa yang sudah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut dalam satu tahun anggaran.

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur organisasi Direktorat Perundingan Bilateral

Struktur organisasi Direktorat Perundingan Bilateral terdiri atas:

- Subbagian Tata Usaha; dan

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Permendag Nomor 29 tahun 2022 Pasal 170 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan Direktorat Perundingan Bilateral

- Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional berada di bawah Direktur Perundingan Bilateral dengan 7 (tujuh) Tim Kerja yang terdiri dari: Tim Afrika dan Timur Tengah, Tim Eropa, Tim Asia Selatan, Tengah dan Timur, Tim Amerika, Tim Asia Tenggara dan Pasifik, Tim Implementasi, Tim Pengembangan SDM.

TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Permendag Nomor 29 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Direktorat Perundingan Bilateral dalam melaksanakan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan akses pasar barang di forum perundingan bilateral, dengan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan bilateral dengan negara-negara di kawasan asia, pasifik, eropa, amerika, afrika dan timur tengah;
2. penyiapan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang,

investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan bilateral dengan negara-negara di kawasan asia, pasifik, eropa, amerika, afrika dan timur tengah;

3. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan bilateral dengan negara-negara di kawasan asia, pasifik, eropa, amerika, afrika, dan timur tengah;
4. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perundingan Bilateral.

PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi mencabut status pandemi COVID-19 di Indonesia pada 21 Juni 2023 dan Indonesia mulai bangkit dari status pandemi Covid-19 setelah 3 tahun fokus dalam penanganan dan pemulihan ekonomi nasional. Kementerian Perdagangan mendapatkan 3 mandat khusus dari Bapak Presiden dalam strategi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu: Menjaga stabilitas harga terutama inflasi barang kebutuhan pokok dan

barang penting, meningkatkan ekspor melalui pembukaan akses pasar dengan perjanjian perdagangan internasional dengan prioritas negara - negara tujuan ekspor non tradisional, dan membantu pelaku UMKM dalam menembus pasar ekspor. Hal ini menjadi fokus Kementerian Perdagangan dalam penyusunan program kerja dan anggaran.

Indonesia terus melakukan peran aktif dalam perundingan perdagangan internasional dengan negara mitra dagang memperjuangkan akses produk Indonesia agar tetap diterima di pasar internasional. Hal ini akan membantu perdagangan internasional Indonesia yang sedang bangkit lagi setelah selesainya status pandemi Covid-19 di negeri ini. Jika jumlah ekspor meningkat, maka cadangan devisa Indonesia pun akan tetap berada di level yang bagus.

Perekonomian dunia saat ini berkembang sangat cepat dan Indonesia harus siap untuk menghadapi persaingan perdagangan dunia yang ketat dengan negara lain. Untuk itu penting bagi Indonesia agar dapat meningkatkan daya saing, salah satunya melalui forum perundingan dan kerjasama bilateral dengan negara mitra dagang. Diharapkan dengan adanya CEPA, FTA maupun PTA dengan negara mitra dagang dapat membuka akses pasar barang Indonesia yang luas di luar negeri.

Dalam rangka meningkatkan akses pasar barang di forum bilateral, Direktorat Perundingan Bilateral melakukan penjajakan perundingan ke negara-negara non tradisional serta terus melanjutkan berbagai perundingan dan kerjasama dengan negara mitra yang masih belum selesai.

Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional selama tahun 2023 telah mengimplementasikan 3 perjanjian perdagangan dan Direktorat Perundingan Bilateral telah memberikan kontribusi implementasi 2 perjanjian perdagangan yaitu Perjanjian Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA) per 1 September 2023 dan Indonesia-Korea CEPA yang diimplementasikan per 2 Januari 2023. Selain itu terdapat juga perjanjian perdagangan yang telah diselesaikan pada 2023 yakni Protokol Perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan ditandatanganinya perjanjian perdagangan Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement (BTA).

Dengan disepakati dan diberlakukannya beberapa perjanjian tersebut, Direktorat Perundingan Bilateral memiliki peran yang signifikan dalam mendukung capaian organisasi dan mandat Presiden meningkatkan ekspor melalui pembukaan akses pasar melalui perjanjian perdagangan internasional.

Dengan perjanjian perdagangan bilateral dengan negara mitra dagang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam negeri yang pada akhirnya dapat meningkatkan ekspor Indonesia, menjaga neraca perdagangan dan devisa negara.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Direktorat Perundingan Bilateral meningkatkan perannya dalam negosiasi perjanjian dan kerjasama bilateral dengan negara mitra dagang. Tujuan negosiasi perjanjian dan kerjasama bilateral yang dilakukan mencakup meningkatkan pasar produk ekspor non-migas, optimalisasi upaya pengamanan perdagangan dan Upaya peningkatan pemahaman stakeholders terhadap hasil-hasil kesepakatan perjanjian perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 - 2025 adalah **"perdagangan luar negeri yang lebih menguntungkan dan mendukung perekonomian nasional agar mampu memaksimalkan manfaat, sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi"**. Upaya yang dilakukan Direktorat Perundingan Bilateral sesuai arah kebijakan tersebut adalah memperkuat posisi nasional di fora perundingan bilateral.

Berdasarkan RPJMN tahun 2020 - 2024, visi pemerintahan Indonesia selama tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

Sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia hanya akan ada satu Visi di Pemerintahan ini, sehingga seluruh Kementerian/Lembaga harus memiliki Visi yang sama dan bersatu dalam mewujudkan Visi Pemerintah dimaksud.

Dalam rangka mewujudkan Visi "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkeprabadian berlandaskan gotong-royong", maka misi pemerintahan periode 2020 - 2024 yang dikenal sebagai Nawacita Kedua adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Selanjutnya, untuk menjembatani visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024 dalam melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan sebagaimana dikemukakan pada Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024, memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri;
2. Meningkatkan kinerja perdagangan dalam negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di sektor perdagangan.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Republik Indonesia serta misi Kementerian Perdagangan, Ditjen PPI mengemban 5 (lima) misi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses pasar Indonesia di pasar Internasional melalui perundingan perdagangan internasional;
2. Menjaga kepentingan Indonesia dalam tata aturan perdagangan dunia melalui proses perundingan perdagangan internasional;
3. Melindungi Indonesia dari praktik-praktik perdagangan internasional yang tidak adil;
4. Mendorong implementasi hasil-hasil perundingan perdagangan internasional dalam tata aturan nasional agar dapat dimanfaatkan secara optimal; dan
5. Mendorong pemanfaatan hasil-hasil perundingan dan perjanjian perdagangan internasional sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Perdagangan dan misi Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, maka Direktorat Perundingan Bilateral mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan bilateral dengan negara-negara di kawasan asia, pasifik, eropa, amerika, afrika dan timur tengah;

2. Penyiapan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan bilateral dengan negara-negara di kawasan asia, pasifik, eropa, amerika, afrika dan timur tengah;
3. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan perundingan perdagangan barang, investasi perdagangan barang, kerja sama ekonomi dan teknik perdagangan, fasilitasi perdagangan di forum perundingan bilateral dengan negara-negara di kawasan asia, pasifik, eropa, amerika, afrika, dan timur tengah;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perundingan Bilateral.

Keterkaitan atas visi, misi, fungsi Direktorat Perundingan Bilateral kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja yang mencakup dua sasaran kinerja, yaitu : (i) Meningkatnya akses pasar barang di pasar internasional serta mengamankan kebijakan yang menjadi kepentingan nasional dari praktek perdagangan internasional yang tidak adil; (ii) Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan.

RENCANA KERJA

Sebagai turunan dari Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020-2024 disusun Rencana Kerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2023 untuk menjabarkan perencanaan kegiatan dan kinerja pada tahun 2023. Untuk mencapai sasaran kinerja Direktorat Perundingan Bilateral membagi indikator kinerja menjadi tiga indicator sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja Direktur Perundingan Bilateral sebagai berikut:

1. Jumlah negosiasi perdagangan dengan negara mitra perdagangan bilateral
2. Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan bilateral ke instansi yang menangani
3. Persentase pemahaman pemangku kepentingan terkait hasil perundingan perdagangan bilateral

Tiga kegiatan tersebut mendapatkan alokasi awal anggaran T.A 2023 sebesar Rp. 10.000.000.000 yang kemudian direvisi menjadi Rp. 7.700.000.000 dengan nilai realisasi mencapai 90.52% yaitu sebesar RP. 6.970.227.533

Tabel 2. Kegiatan Direktorat Perundingan Bilateral

Indikator Kinerja	Target Kinerja
Jumlah negosiasi perdagangan dengan negara mitra perdagangan bilateral	7 Perundingan
Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan bilateral ke instansi yang menangani	100 Persen
Persentase pemahaman pemangku kepentingan terkait hasil perundingan perdagangan bilateral	83 Persen
Jumlah anggaran (awal)	Rp. 10.000.000.000
Jumlah anggaran setelah penghematan anggaran	Rp. 7.700.000.000
Total realisasi anggaran	Rp. 6. 966.190.000.

Sumber: Perkin DPB (2023)

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan kesepakatan antara Direktur Perundingan Bilateral dengan Direktur Jenderal PPI dalam menetapkan kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Ditjen PPI Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja menggambarkan target kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja tersebut akan menjadi acuan dalam pengukuran capaian kinerja dalam pelaporan kinerja Direktorat Perundingan Bilateral tahun 2023, di mana secara keseluruhan terdapat 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2023



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-235228600, Ext. 36900 Fax. 021-23528610
www.kemendag.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NOMOR : PR.02.01/28/PPI.5/PK/12/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Johni Martha
Jabatan : Direktur Perundingan Bilateral

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Djatmiko Bris Witjaksono
Jabatan : Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional

Selaku *atasan langsung* pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Desember 2022

Pihak Kedua

Djatmiko Bris Witjaksono

Pihak Pertama

Johni Martha

Gambar 2. Perjanjian Kinerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2023

LAPORAN KINERJA DPB 2023

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PERUNDINGAN BILATERAL

KEGIATAN: PERUNDINGAN PERDAGANGAN BILATERAL

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akses pasar barang di pasar internasional serta mengamankan kebijakan yang menjadi kepentingan nasional dari praktik perdagangan internasional yang tidak adil	Jumlah perundingan perdagangan dengan negara mitra perdagangan bilateral	Perundingan	7
2	Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional	Persentase penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan bilateral ke instansi yang menangani	Persentase	100
		Persentase pemahaman pemangku kepentingan terkait hasil perundingan perdagangan bilateral	Persentase	83

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Perundingan Perdagangan Bilateral	10.000.000.000

Jakarta, 29 Desember 2022

Direktur Jenderal
Perundingan Perdagangan Internasional


Djatmiko Bris Witjaksono

Direktur Perundingan Bilateral



Johni Martha

Gambar 3. Lampiran Perjanjian Kinerja Direktorat Perundingan Bilateral Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN ORGANISASI

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen PPI 2020 - 2024 dan perjanjian kinerja pada tahun 2023, Direktorat Perundingan Bilateral menetapkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang akan diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Seperti halnya pada tahun sebelumnya, pengukuran capaian kinerja tahun 2023 juga dilakukan dengan membandingkan target yang seharusnya dicapai dengan realisasinya.

Sasaran Kegiatan I : Meningkatnya akses pasar barang di pasar internasional serta mengamankan kebijakan yang menjadi kepentingan nasional dari praktik perdagangan internasional yang tidak adil

Tabel 3. Realisasi dan capaian indikator kinerja 1 tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah negosiasi perdagangan dengan negara mitra perdagangan bilateral	7	14	200 %
Kinerja tahun 2022	7	11	157 %

Pada tahun 2023, DPB diberikan target untuk melaksanakan 7 negosiasi dengan negara mitra dagang. Target indikator 1 berhasil dicapai dengan realisasi pelaksanaan negosiasi sebanyak 14 perundingan dengan capaian sebesar 200 %, dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \% \\
 &= \frac{14}{7} \times 100 \% = 200 \%
 \end{aligned}$$

Capaian tersebut mengalami peningkatan sebanyak 43% jika di bandingkan dengan capaian tahun 2022, pada tahun 2022 capaian pelaksanaan perundingan bilateral Indonesia sebanyak 11 perundingan.

Perundingan Perdagangan Bilateral Tahun 2023

Pada tahun 2023 Direktorat Perundingan Bilateral melaksanakan target kinerja memperluas akses perdagangan Internasional Indonesia dengan melakukan berbagai negosiasi bilateral dengan negara mitra dagang. Perkembangan perundingan yang dilakukan pada tahun 2023 antara lain:

1. Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICACEPA)

Pada tahun 2023, perundingan Indonesia-Canada (ICACEPA) telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) putaran yaitu Putaran Keempat pada 16 - 17 Februari 2023 di Bandung, Putaran Kelima pada 29 - 2 Juni 2023 di Ottawa-Kanada dan Putaran Keenam pada 23-27 Oktober 2023 secara hybrid di Yogyakarta.

Dalam perundingan Putaran Ketujuh dibahas sebanyak 20 (dua puluh) Isu Runding termasuk diskusi awal untuk isu State-Owned Enterprises (SOEs). Secara umum hingga Putaran Ketujuh, perundingan mencatat hasil positif dan kemajuan signifikan pada pembahasan Bab Kepabeanan dan Fasilitasi Perdagangan, Telekomunikasi dan Persaingan Usaha. Untuk perundingan akses pasar Indonesia mengajukan penyesuaian target liberalisasi perdagangan barang menjadi 70,5%, sementara dalam pembahasan Isu Runding Pengadaan Pemerintah, Indonesia belum menyepakati usulan Kanada atas akses pasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP). Dalam negosiasi untuk isu Perdagangan Inklusif, Lingkungan dan Ketenagakerjaan, Indonesia mendorong untuk tetap pada pendekatan diskusi teks (text-based discussion).

Perundingan Putaran Ketujuh akan dilaksanakan secara fisik pada tanggal 4-8 Maret 2024 di Indonesia. Penyelesaian perundingan secara substantif ditargetkan rampung pada akhir tahun 2024 sesuai kesepakatan bersama Kepala Negara.



Gambar 4. Perundingan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) Putaran ke-6, Yogyakarta, 23-27 Oktober 2023

2. Customs and Trade Facilitation (CTF) Indo-Pacific Economic Framework (IPEF)

Selama tahun 2023, perundingan IPEF dilakukan secara intensif sebanyak 6 (enam) putaran, yaitu: Putaran Kedua pada 16-23 Maret 2023 di Bali-Indonesia; Putaran Ketiga pada 8-15 Mei 2023 di Singapura; Putaran Keempat pada 12-15 Juli 2023 di Busan-Korea Selatan; Putaran Kelima pada 7-16 September 2023 di Bangkok-Thailand; Putaran Keenam pada 15-24 Oktober 2023 di Kuala Lumpur-Malaysia; dan Putaran Ketujuh pada 15-16 November 2023 di San Francisco-Amerika Serikat.

Pada Putaran Ketujuh, perundingan IPEF secara keseluruhan telah mencapai perkembangan yang signifikan khususnya dengan ditandatanganinya perjanjian Pilar 2: Rantai Pasok, serta penyelesaian substansial pada perjanjian Pilar 3: Ekonomi Bersih, dan perjanjian Pilar 4: Ekonomi Adil. Adapun pembahasan Pilar 1: Perdagangan akan dilanjutkan pada kuartal I 2024 untuk mencapai target penyelesaian substansial pada akhir 2024.

Direktorat Perundingan Bilateral selaku Penanggung Jawab pada Kluster Customs and Trade Facilitation (CTF) di bawah Pilar 1: Perdagangan, menghadiri seluruh putaran IPEF pada tahun 2023. Perkembangan terakhir per 11 November 2023, sebanyak 132 dari total 138 paragraf atau 95,65% paragraf Chapter CTF telah diselesaikan.

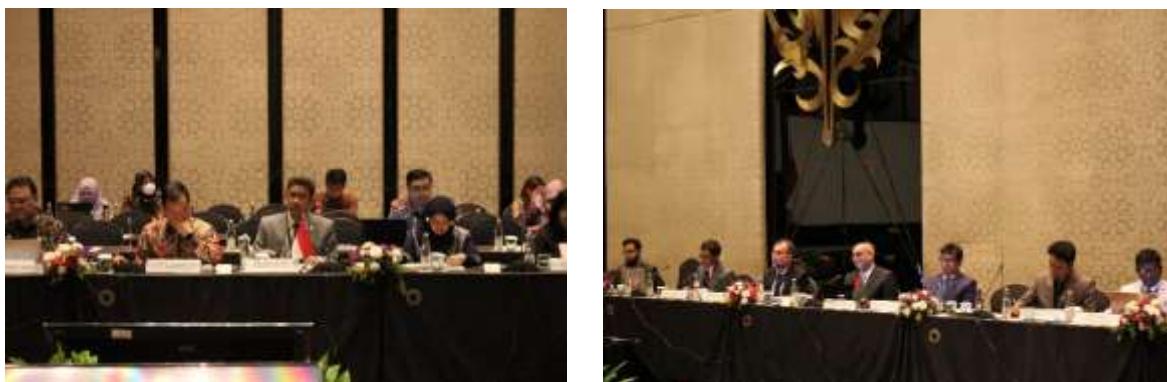
Perundingan Kluster CTF akan dilanjutkan secara virtual di bulan Agustus 2024. Pembahasan pasal-pasal yang belum disepakati diupayakan akan dapat diselesaikan secara substansial pada akhir 2024.



Gambar 5. Customs and Trade Facilitation (CTF) Indo-Pacific Economic Framework (IPEF)
Putaran Keenam Kuala Lumpur-Malaysia, 15-24 Oktober 2023

3. Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement (IB-PTA)

- Perundingan IB-PTA dimulai sejak tahun 2019 dan telah berlangsung sebanyak 4 (empat) putaran (perundingan putaran ke-4 dilaksanakan di Bandung pada tanggal 16-19 Mei 2023). Kedua negara telah menyepakati mayoritas teks perjanjian dan telah melaksanakan pertukaran revised offer pada 10 Agustus 2023.
- Perundingan putaran ke-5 dijadwalkan berlangsung di Semarang, 28-30 Agustus 2023 untuk memfinalisasi seluruh isu pending (teks perjanjian dan akses pasar), namun Bangladesh meminta penundaan sampai Indonesia dapat mengakomodasi pos tarif request prioritasnya. Kedua negara belum dapat menyepakati isu akses pasar.
- Kementerian Perdagangan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian, KBRI Dhaka, dan pihak Bangladesh terkait upaya penyelesaian perundingan IB-PTA, serta akan berkonsultasi dengan Kemenko Bidang Perekonomian terkait tindak lanjut perundingan IB-PTA.
- Berdasarkan kajian manfaat IB-PTA yang telah dilakukan oleh Puska KPI BP3 Kemendag, prediksi ekspor Indonesia ke Bangladesh akan mengalami peningkatan rata-rata 3,6% per tahun selama 2023-2025. Pada tahun 2025 nilai ekspor Indonesia akan mencapai USD 3,6 Miliar, kemudian mengalami kenaikan secara periodik hingga 2030 dengan nilai ekspor mencapai USD 4,3 Miliar.



Gambar 6. Perundingan putaran ke-4 Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement (IB-PTA) Bandung, 16-19 Mei 2023

4. Joint Committee Meeting Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (JCM IK-CEPA)

- Perundingan pertama Joint Committee Meeting (JCM) IK-CEPA telah dilaksanakan di Bali, 11-12 Desember 2023.
- Pada pertemuan tersebut, kedua pihak mengevaluasi implementasi IK-CEPA yang diberlakukan di kedua negara sejak tanggal 1 Januari 2023.
- Isu-isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut yakni:
 - 1) Tinjauan Hubungan Perdagangan dan Investasi Bilateral;
 - 2) Perdagangan Barang;
 - 3) Perdagangan Jasa;
 - 4) Kerja Sama Ekonomi;
 - 5) Kepabeanan dan Fasilitasi Perdagangan
- Kedua negara menjadwalkan pertemuan kedua JCM IK-CEPA dilaksanakan di Korea pada tahun 2024.



Gambar 7. Perundingan Joint Committee Meeting Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (JCM IK-CEPA)
Bali, 11-12 Desember 2023

5. Protokol Perubahan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)

- Pada tahun 2023, kedua negara melakukan sejumlah pertemuan baik fisik maupun virtual, yaitu JCM-18 IJEPA, Chief Negotiator Meeting, Pertemuan Intersesi, Pertemuan Tingkat Ahli Isu Perikanan, dan Pertemuan Tim Legal Pembahasan Draft Protokol Perubahan IJEPA.
- Indonesia dan Jepang telah menyelesaikan substansi perundingan Protokol Perubahan IJEPA pada pertemuan intersesi di Tokyo tanggal 22 - 24 November 2023.
- Dengan telah diselesaiannya isu akses pasar perdagangan barang, perundingan Protokol Perubahan IJEPA yang telah berjalan sejak 2019 dapat dituntaskan dan akan dilanjutkan ke proses legal scrub, penandatanganan dan ratifikasi.
- Selain Perdagangan Barang, sektor lain yang mengalami perubahan dan peningkatan dalam Protokol Perubahan IJEPA adalah Perdagangan Jasa, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Pergerakan Orang Perseorangan, Kerja Sama, Kekayaan Intelektual, dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Penyelesaian substansi perundingan Protokol Perubahan IJEPA menjadi salah satu deliverable pertemuan bilateral Presiden RI dan PM Jepang pada tanggal 16 Desember 2023. Saat ini tengah dilakukan proses legal scrubbing oleh tim legal kedua pihak. Penandatanganan Protokol Perubahan IJEPA ditargetkan dapat terlaksana pada semester I 2024.



Gambar 8. Pengumuman Penyelesaian Substansi Protokol Perubahan IJEPA
Tokyo, 16 Desember 2023

6. Peluncuran Perundingan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement

Launching perundingan telah dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2023. Perundingan Indonesia-Peru CEPA akan dilakukan secara bertahap (incremental). Babak perundingan akan dimulai dengan pembahasan perdagangan barang, sementara perdagangan jasa, investasi, lalu berbagai area kerja sama lainnya akan dirundingkan selanjutnya. Chief Negotiator Indonesia dan Peru telah bertemu pada tanggal 29 September 2023 untuk menyepakati timeline perundingan, dan pembentukan kelompok kerja serta penyusunan draf awal masing-masing chapter. Berdasarkan hasil korespondensi Indonesia dengan Peru, disepakati bahwa penyelenggaraan perundingan putaran pertama Indonesia-Peru CEPA akan dilaksanakan pada awal tahun 2024.



Gambar 9. Peluncuran Indonesia Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement
Jakarta, 15 Agustus 2023

7. Joint Commission Meeting (JCM) ke-1 Indonesia - Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC - CEPA)

JCM IC-CEPA ke-1 tanggal 14 November 2023 di Tangerang. Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Perundingan Bilateral mewakili Dirjen PPI sementara Delegasi Chile dipimpin oleh Direktur Asia dan Oseania, Kementerian Luar Negeri Chile. JCM IC-CEPA ke-1 membahas 7 mata agenda yaitu:

- Overview of Trade Relationships Chile - Indonesia.
- Implementation of the Protocol to Include Trade in Services in the IC-CEPA.
- Trade of Halal products
- Global Value Chains
- Report of the 1st Committee on Trade in Goods (CTIG) Meeting
- General Review (GR) of the IC-CEPA.
- Regional & Global Economic Integration.

Implementasi IC-CEPA berdampak positif pada perdagangan barang Indonesia yang meningkat signifikan dengan tren 21.4% selama periode 2018-2022, dengan surplus bagi Indonesia.



Gambar 10. Joint Commission Meeting (JCM) ke-1
Indonesia - Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC - CEPA)
Tangerang, 14 November 2023

8. Indonesia - EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA)

- Indonesia dan EU telah melaksanakan empat Putaran Perundingan di tahun 2023 yaitu:
 - a) Putaran ke-13 (6 - 10 Februari 2023 di Bali, Indonesia);
 - b) Putaran ke-14 (8 - 12 Mei 2023 di Brussels, Belgia);
 - c) Putaran ke-15 (10 - 14 Juli 2023 di Yogyakarta, Indonesia); dan
 - d) Putaran ke-16 (4 - 8 Desember 2023 di Brussels, Belgia).
- Hingga Putaran ke-16, 8 dari 21 Bab telah diselesaikan, yakni Sanitari dan Fitosanitari, Praktik Penyusunan Regulasi (Good Regulatory Practice), Kepabeanan dan Fasilitasi Perdagangan, Pengamanan Perdagangan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Transparansi, Kerja Sama Ekonomi dan Pengembangan Kapasitas dan Penyelesaian Sengketa.
- Untuk isu akses pasar, telah tercapai kemajuan dalam pembahasan di sektor barang, jasa, investasi, dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kedua Pihak menyepakati tindak lanjut pembahasan akses pasar di tahun 2024.
- Kedua pihak menargetkan penyelesaian perundingan di tahun 2024.



Gambar 11. Perundingan IEU-CEPA Putaran ke-13, Bali, 6-10 Februari 2023

9. Indonesia-EAEU Free Trade Agreement (FTA)

- Indonesia dan EAEU telah melaksanakan tiga Putaran Perundingan di tahun 2023 yaitu:
 - a) Putaran ke-1 (3 - 5 Maret 2023 di Jakarta, Indonesia);
 - b) Putaran ke-2 (24 - 26 Juli 2023 di Moskow, Rusia); dan
 - c) Putaran ke-3 (13 - 15 Desember 2023 di Bali, Indonesia).
- Hingga Putaran ke-3, terdapat dua Bab yang berhasil disepakati, yakni Administrasi Kepabeanan dan Fasilitasi Perdagangan, dan Kekayaan Intelektual.
- Untuk akses pasar barang, telah dipertukarkan initial offer. Kedua Pihak menyepakati timeline pertukaran request dan 2nd offer.
- Kedua pihak menargetkan penyelesaian perundingan di tahun 2024.



Gambar 12. Perundingan Indonesia-EAEU FTA Putaran ke-2, Moskow, 24-26 Juli 2023

10. Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement (II-PTA)

- Perundingan Indonesia-Iran PTA dimulai sejak tahun 2010 dan berlangsung sebanyak 7 Putaran dan 10 Pertemuan Intersesi.
- Indonesia - Iran PTA ditandatangani pada 23 Mei 2023 di Bogor oleh Menteri Perdagangan RI, H.E. Zulkifli Hasan & Menteri Luar Negeri Iran, H.E. Hossein Amirabdollahian.

- Indonesia memberikan preferensi tarif sebanyak 227 pos tarif, sementara Iran memberikan preferensi tarif sebanyak 239 pos tarif.
- Saat ini sedang dalam proses ratifikasi (menunggu jadwal rapat kerja antara Kementerian Perdagangan dengan DPR RI).



Gambar 13. Penandatanganan II-PTA, Bogor 23 Mei 2023

11. JCM Indonesia-Mozambik Preferential Trade Agreement (IM-PTA)

Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan Joint Committee Meeting (JCM) ke-1 Indonesia-Mozambik Preferential Trade Agreement (IM-PTA) pada tanggal 19 Oktober 2023. Pada pertemuan, kedua pihak menekankan pentingnya kolaborasi dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan IM-PTA sebagai isu utama implementasi. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kerja sama baik B-to-B maupun G-to-G, mengintensifkan sosialisasi/diseminasi yang lebih luas dan tepat sasaran, serta pertukaran informasi prosedur ekspor dan impor. Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia juga mengusulkan perlunya perluasan PTA menjadi kerja sama ekonomi komprehensif (EPA) sebagai salah satu agenda pembahasan di pertemuan berikutnya (JCM-2) termasuk penyampaian proposal imbal dagang sebagai alternatif mekanisme pembayaran yang dapat dijajaki dengan negara-negara di kawasan Afrika. Kedua negara sepakat untuk melaksanakan JCM ke-2 pada tahun 2025 di Mozambik.



Gambar 14. Joint Commission Meeting (JCM) ke-1 Indonesia-Mozambik PTA
Tangerang, 19 Oktober 2023

12. Indonesia-Mauritius Preferential Trade Agreement (PTA)

Perundingan Indonesia-Mauritius PTA telah berjalan empat putaran perundingan. Putaran ke-4 dilaksanakan pada tanggal 20-21 Desember 2023 di Bali, Indonesia, dengan agenda pembahasan main text PTA, teks ROO, serta akses pasar.

Dalam putaran tersebut keseluruhan teks perjanjian (main text PTA dan ROO) berhasil diselesaikan.

Terkait akses pasar, kedua negara telah mempertukarkan initial offer pada November 2023 dan dibahas pada putaran ke-4. Namun demikian, belum terdapat perkembangan signifikan mengingat sebagian besar produk yang menjadi kepentingan utama masing-masing pihak belum dapat diakomodir (exclusion). Kedua pihak akan segera mempertukarkan revisi offer ada awal 2024. Perundingan Indonesia-Mauritius PTA ditargetkan dapat selesai di tahun 2024.



Gambar 15. Perundingan Indonesia - Mauritius PTA Putaran ke-4
Bali, 20-21 Desember 2023

13. Sub-Committee Rules on Origin Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement

Pertemuan Sub-Committee Rules of Origin Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (SC ROO IA-CEPA) ke-1 diselenggarakan secara daring dengan Australia sebagai tuan rumah pada 7 Maret 2023. Delegasi RI terdiri dari Direktorat Perundingan Bilateral (co-chair), Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor, serta Direktorat Perundingan ASEAN dan Direktorat Kerja Sama Internasional dan Kepabeanan Cukai (KSIKC).

Hasil diskusi pada pertemuan SC ROO ke-1 yaitu:

- Penolakan certificate of origin (COO) Australia. Indonesia mengonfirmasi bahwa penolakan COO diakibatkan kesalahan importir yang tidak mengisi facility code yang benar.
- Pembaharuan product specific rules (PSR) IA-CEPA ke HS 2022. Australia akan menyampaikan template penyusunan draf PSR HS 2022 IA-CEPA untuk ditanggapi oleh Indonesia.
- Peningkatan dan monitoring utilisasi IA-CEPA. Kedua negara sepakat untuk mempertukarkan data utilisasi atau customs clearance dari pencatatan masing-masing pada pertemuan Committee on Trade in Goods selanjutnya atau sebelum Joint Committee Meeting.



Gambar 16. Sub-Committee Rules on Origin Meeting
Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement

14. Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement (BTA)

Perjanjian perdagangan perbatasan Indonesia-Malaysia BTA telah ditandatangani Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan dan Menteri Perdagangan, Investasi, dan Perindustrian Malaysia Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, pada tanggal 8 Juni 2023 di Putra jaya, Malaysia. Penandatanganan disaksikan langsung Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

BTA merupakan perjanjian yang mengatur perdagangan masyarakat tradisional di perbatasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perundingan Review BTA dilakukan sejak tahun 2009 dengan tujuan memperbaharui BTA yang ditandatangani tahun 1970. Kedua negara menyepakati secara substansi naskah BTA pada 21 Maret 2022.

Ruang lingkup BTA di antaranya:

- Daftar barang kebutuhan sehari-hari yang diperdagangkan menjadi lebih spesifik dibandingkan BTA 1970 (60 barang Indonesia; 32 barang Malaysia).
- Batas maksimal nilai perdagangan perbatasan yaitu sebesar 600 Ringgit Malaysia per pemegang kartu identitas lintas batas per bulan.

- Penyesuaian Entry/Exit Points wilayah perdagangan perbatasan merujuk pada Border Crossing Agreement terbaru.
- Ketentuan mekanisme review melalui komite BTA.



Gambar 17. Penandatangan Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement (BTA)
Putra jaya, Malaysia, 8 Juni 2023

Sasaran Kegiatan II : Meningkatnya implementasi dan pemahaman hasil perundingan perdagangan internasional

Tabel 4. Realisasi dan capaian indikator kinerja II dan III tahun 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan bilateral ke instansi yang menangani	100 %	100 %	100 %
Kinerja tahun 2022	100 %	100 %	100 %
Persentase pemahaman pemangku kepentingan terkait hasil perundingan perdagangan bilateral	83	83.13	100.16%
Kinerja tahun 2022	81	83	102.47%

Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan bilateral ke instansi yang menangani.

Pada tahun 2023, Target Penyelesaian pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian perdagangan bilateral ke instansi yang menangani ditargetkan sebesar 100%. Indikator ini dikatakan telah tercapai apabila, Kementerian Perdagangan dalam hal ini Direktorat Perundingan Bilateral telah menyampaikan atau melimpahkan berkas atas perjanjian yang akan diproses ratifikasi kepada instansi lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dari 3 proses ratifikasi yang ditangani DPB di tahun 2023, DPB mampu memenuhi target yang telah ditentukan, dengan nilai capaian sebesar 100%. Dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

$$= \frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$$

Penyelesaian Pelimpahan Dokumen Ratifikasi yang dilakukan DPB pada tahun 2023 diantaranya sebagai berikut:

1. Ratifikasi Perjanjian Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA)

- IUAE-CEPA ditandatangani pada 1 Juli 2022 di Abu Dhabi Oleh Menteri Perdagangan RI, H.E. Zulkifli Hasan dan Menteri Ekonomi PEA, H.E. Abdulla bin Touq Al Marri.
- Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian pada tanggal 16 Februari 2023, telah diputuskan bahwa pengesahan IUAE-CEPA dilakukan melalui instrumen hukum Peraturan Presiden (Perpres).
- Pada tanggal 28 Februari 2023 Kemlu telah menyampaikan surat Menteri Luar Negeri No 066/HI/02/2023/08/01 perihal Permohonan Izin Prakarsa penyusunan R-Perpres Pengesahan IUAE-CEPA kepada Kedeputian Bidang Hukum Kementerian Sekretaris Negara.
- Menindaklanjuti Permohonan Izin Prakarsa tersebut, Mensesneg melalui surat Nomor B-313/M/D-1/HK.03.04/04/2023 tanggal 5 April 2023 menyampaikan persetujuan Presiden atas izin prakarsa penyusunan R-Perpres dimaksud kepada Menlu.
- IUAE-CEPA disahkan melalui Perpres No. 43 Tahun 2023 pada 12 Juli 2023 dan telah diimplementasikan (Entry Into Force) pada 1 September 2023.
- Terdapat 5 Peraturan Teknis Implementasi:
 1. PMK 87/2023 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk;
 2. PMK 88/2023 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;
 3. Permendag 28/2023 tentang Ketentuan Asal Barang dan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia;
 4. Permendag 29/2023 tentang Kebijakan Penerapan Kuota Tingkat Tarif (Tariff Rate Quota) Untuk Impor Barang Tertentu;
 5. Permenperin 22/2023 mengenai pedoman pelaksanaan pemanfaatan skema TRQ untuk produk bahan baku plastik tertentu

- Pada cakupan isu perdagangan barang, Indonesia mengkomitmenkan 90,77% dari jumlah total pos tarifnya, sementara UAE mengkomitmenkan 93,97% dari jumlah total pos tarifnya.
- Sejak IUAE-CEPA diimplementasikan pada 1 September 2023, pemanfaatan penggunaan SKA hingga Desember 2023 mencapai 1.908 lembar SKA dengan nilai FOB sebesar USD 358 juta.

2. Ratifikasi Perjanjian Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement (PTA)

- Indonesia - Iran PTA ditandatangani pada 23 Mei 2023 di Bogor oleh Menteri Perdagangan RI, H.E. Zulkifli Hasan & Menteri Luar Negeri Iran, H.E. Hossein Amirabdollahian.
- Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Indonesia-Iran PTA, Kementerian Perdagangan telah mengirimkan surat Direktur Perundingan Bilateral Nomor PB.02/229/PPI.5/SD/05/2023 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri perihal penyampaian Naskah Persetujuan Indonesia-Iran PTA agar dapat diberikan Certified true copy atas Indonesia-Iran PTA yang selanjutnya akan Kementerian disampaikan Sekretariat kepada Negara sebagai dokumen pendukung proses pra pengesahan Indonesia-Iran PTA. Hal ini sekaligus menandakan capaian kinerja pelimpahan dokumen ratifikasi perjanjian Indonesia-Iran PTA ke instansi yang menangani yang di emban Direktorat Perundingan Bilateral telah terpenuhi.
- Proses ratifikasi Indonesia-Iran PTA saat ini masih menunggu agenda rapat kerja Menteri Perdagangan RI dengan Komisi VI DPR RI.

3. Ratifikasi Perjanjian Indonesia-Malaysia Border Trade Agreement (BTA)

Persetujuan Perdagangan Perbatasan / Border Trade Agreement (BTA) Indonesia-Malaysia telah ditandatangani oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Investasi, Perdagangan dan Perindustrian Malaysia pada tanggal 8 Juni 2023 di Putrajaya. Berdasarkan Pasal 9-11 "Pengesahan Perjanjian Internasional" UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional dan Pasal 3, Ayat 2, Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan, Pengesahan BTA menggunakan Perpres.

Pengesahan Indonesia-Malaysia BTA tidak melalui DPR dan saat ini berkas usulan ratifikasi sudah ada di Kemenkumham.

Pelimpahan dokumen pendukung ratifikasi Indonesia-Malaysia BTA disampaikan oleh Dit Perundingan Bilateral kepada Sesditjen PPI melalui Nota Dinas Direktur Perundingan Bilateral Nomor PB.02.01/325/PPI.5/ND/08/2023 pada tanggal 9 Agustus 2023 berupa Salinan Naskah, Terjemahan naskah, Rancangan Perpres dan Naskah Penjelasan

Persentase pemahaman pemangku kepentingan terkait hasil perundingan perdagangan bilateral

Pada indikator kinerja Persentase pemahaman pemangku kepentingan terkait hasil perundingan perdagangan bilateral dapat dicapai melampaui target dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ = \frac{83.13}{83} \times 100\% = 100.16\%$$

Persentase pemahaman pemangku kepentingan terkait hasil perundingan perdagangan bilateral diperoleh melalui kuisioner yang di berikan kepada pemangku kepentingan pada saat penyelenggaraan konsultasi publik yang dilakukan oleh Direktorat Perundingan Bilateral.

Konsultasi Publik “Hasil-Hasil Kesepakatan Perdagangan Bilateral Indonesia Dengan Mitra Dagang Dan Pemanfaatannya Sebagai Upaya Meningkatkan Ekspor” telah dilaksanakan di Semarang pada tanggal 19 Juni 2023 dan dihadiri oleh pelaku usaha dan eksportir di Provinsi Jawa Tengah serta perwakilan instansi pemerintahan terkait di Semarang.

Konsultasi Publik bertujuan untuk:

1. Menyampaikan informasi terkait perkembangan perundingan Indonesia dengan negara mitra dagang kepada pemangku kepentingan;

2. Mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan terkait peluang ekspor produk potensial, kendala ekspor yang dialami dengan negara mitra dagang serta mengetahui persentase pemahaman pemangku kepentingan terkait hasil perundingan perdagangan bilateral DA yang disampaikan oleh narasumber.



Gambar 18. Narasumber Konsultasi Publik di Semarang, tanggal 19 Juni 2023

Bahan paparan disampaikan oleh pemateri dari Direktorat Perundingan Bilateral, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Jawa Tengah, Tenaga Ahli FTA Center Semarang. Direktorat Perundingan Bilateral memaparkan perkembangan dan pemanfaatan perundingan perdagangan bilateral yang telah diimplementasi maupun yang masih dalam proses ratifikasi, yaitu: Indonesia-Jepang EPA, Indonesia-Chile CEPA, Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-EFTA CEPA, Indonesia-Korea CEPA, Indonesia-UAE CEPA, Indonesia-Pakistan PTA, Indonesia-Mozambique PTA, dan Indonesia-Iran PTA. Selain itu, disampaikan juga sumber informasi perdagangan yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Dalam kegiatan tersebut juga dijelaskan dampak positif pemberlakuan perjanjian perdagangan bilateral bagi peningkatan ekspor Indonesia dan tentang perkembangan beberapa perundingan Indonesia dengan mitra dagang, proses perumusan request/offer Indonesia dalam perundingan tersebut, masukan yang diharapkan dari para pelaku usaha, serta peluang peningkatan ekspor Jawa Tengah ke negara mitra dagang.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan beberapa upaya pengembangan ekspor yang telah dilakukan antara lain: pelatihan ekspor, pameran dagang, dan business matching. Namun demikian, masih terdapat hambatan ekspor yang dialami pelaku usaha Jawa Tengah, antara lain infrastruktur yang belum maksimal, ketergantungan pada bahan baku impor, tuntutan pasar akan industri hijau, perlunya peningkatan SDM, perlunya sosialisasi regulasi terkait perdagangan, dan pengurusan neraca komoditas serta persetujuan impor yang cukup lama.

Tenaga Ahli Bidang Strategi Promosi dan Pemasaran FTA Center Semarang memaparkan tentang peran FTA Center dalam diplomasi ekonomi di Jawa Tengah, data-data terkait pelaku usaha binaan FTA Center Semarang, serta kesiapan pelaku usaha dan strategi-strategi dalam pemanfaatan kesepakatan perdagangan bilateral Indonesia dengan negara mitra dagang. Saat ini tercatat ada 616 pelaku usaha baru binaan FTA Center Semarang selama periode tahun 2020-2023. Tujuan pelaku ekspor binaan FTA Center Semarang, utamanya yang menggunakan tarif preferential adalah Hongkong, Cambodia, India, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, Brunei, dan China.



Gambar 19. Konsultasi Publik di Semarang, tanggal 19 Juni 2023

Berdasarkan hasil tabulasi kuesioner pre-test dan post-test yang dibagikan kepada seluruh peserta Konsultasi Publik, terdapat peningkatan pemahaman yang cukup signifikan dari para peserta terhadap informasi tentang implementasi perjanjian perdagangan bilateral Indonesia dengan negara mitra dagang dan perkembangan perundingan Indonesia dengan negara mitra dagang yang saat ini tengah berlangsung.

Melalui kuesioner yang diberikan, dapat diketahui bahwa pemahaman para peserta terhadap Hasil-Hasil Kesepakatan Perdagangan Bilateral Indonesia Dengan Mitra Dagang Dan Pemanfaatannya Sebagai Upaya Meningkatkan Ekspor cukup baik, dengan nilai 83,13% (lebih tinggi dari persentase pemahaman yang ditargetkan, yakni 83%).

Dari hasil kesimpulan dan tindak lanjut kegiatan konsultasi publik para peserta mengapresiasi penyelenggaraan konsultasi publik sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta pelaku usaha untuk meningkatkan pemanfaatan perjanjian perdagangan dalam mendorong ekspor Indonesia.

Sedangkan masukan peserta yang perlu mendapat tindak lanjut adalah terkait permasalahan hambatan non-tariff yang dihadapi pelaku usaha, perlunya peran aktif perwakilan dagang di negara mitra untuk memberikan informasi preferensi konsumen dan peraturan yang berlaku (market intelligence) di negara tujuan ekspor.

KINERJA ANGGARAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023, DPB memiliki anggaran awal sebesar Rp.10.000.000.000,-. Namun dengan adanya arahan untuk melakukan dukungan anggaran Keketuaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dan Automatic Adjustment/Self blocking sehingga anggaran DPB tersebut menjadi Rp.7.700.000.000,-. Untuk mendukung capaian kinerja yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, DPB telah merealisasikan anggaran sebesar 90.52% atau sekitar Rp6.970.227.533,- Berikut ini penjabaran realisasi dari masing-masing indikator kinerja:

Tabel 5. Kinerja Anggaran DPB tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Pagu Awal	Pagu AA	Realisasi	Persentase
1	Jumlah negosiasi perdagangan dengan negara mitra perdagangan bilateral	8.852.922.000	7.157.299.000	6.441.805.001	90.22%
2	Penyelesaian Pelimpahan Dokumen Ratifikasi Perjanjian Bilateral ke instansi yang menangani	322.454.000	125.372.000	124.599.830	99.10%
3	Presentase Pemahaman Pemangku Kepentingan terkait Hasil Perundingan Perdagangan Internasional	824.624.000	416.969.000	403.822.702	96.85%
	Total	10.000.000.000	7.700.000.000	6.970.227.533	90.52%

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa, realisasi anggaran dari seluruh indikator kinerja DPB memiliki realisasi di atas 90%. Dengan urutan realisasi anggaran di posisi pertama sebesar 99.10% atau senilai Rp. 124.599.830 untuk Indikator Kinerja Penyelesaian Pelimpahan Dokumen Ratifikasi Perjanjian Bilateral ke instansi yang menangani, dilanjutkan dengan posisi kedua sebesar 96.85% atau senilai Rp. 403.822.702 untuk Indikator Kinerja Presentase Pemahaman Pemangku Kepentingan terkait Hasil Perundingan Perdagangan Internasional, dan di posisi terakhir sebesar 90.22% senilai Rp. 6.441.805.001 untuk Indikator Kinerja Jumlah

LAPORAN KINERJA DPB 2023

negosiasi perdagangan dengan negara mitra perdagangan bilateral. Sehingga rata-rata realisasi anggaran DPB pada tahun 2023 adalah sebesar 90.52% dengan nilai realisasi sebesar Rp. 6.970.227.533 Nilai ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 8.69% dibanding dengan tahun 2022 dengan realisasi anggaran sebesar 99.21% dengan nilai realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.782.399.029.

Penurunan realiasasi anggaran ini diantaranya disebabkan oleh terdapat sisa anggaran dalam nominal yang kecil di banyak Rincian Output (RO) yang tidak dapat lagi dilakukan revisi anggaran pada triwulan ke 4, sehingga sisa anggaran tidak dapat dioptimalkan untuk kegiatan RO lainnya. Pada tahun 2023 jumlah RO Direktorat Perundingan Bilateral sebanyak 33 RO dan pada tahun ini di 2024 di optimalkan menjadi 30 RO (yang pada awalnya diprediksi dapat mencapai 40 RO) untuk lebih mengoptimalkan penyerapan anggaran di akhir triwulan ke 4.

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari 3 (tiga) indikator kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, kinerja Direktorat Perundingan Bilateral pada tahun 2023 dapat dikatakan SANGAT BAIK karena seluruh indikator kinerja telah memiliki capaian lebih dari 100%, bahkan ada capaian kinerja yang mencapai 200% pada (IK-1) jumlah negosiasi perdagangan dengan negara mitra perdagangan bilateral dengan dilaksanakannya 14 Perundingan Bilateral dengan negara mitra dagang sepanjang tahun 2023.

Pada tahun 2023 rata-rata capaian dari 3 (tiga) Indikator Kinerja adalah 133,39%, mengalami kenaikan sebesar 13,53% jika dibandingkan dengan rata-rata capaian pada tahun 2022 sebesar 119.86%.

Pada sisi kinerja anggaran, pada tahun 2023, Direktorat Perundingan Bilateral mengalami penurunan dari sisi persentase serapan anggaran sebesar 90,52%, jika di bandingkan dengan tahun 2022 dengan persentase serapan anggaran sebesar 99,21%. Akan tetapi jika dari nilai total rupiah realisasi anggaran Direktorat Perundingan Bilateral tahun sebesar RP. 6.970.227.533 jika dibanding realiasasi tahun 2022 total nilai rupiah hanya Rp3.782.399.029 atau terjadi peningkatan yang sangat signifikan sebesar 84.28%.

REKOMENDASI

Dalam penyusunan rencana pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 agar dapat dilakukan pengoptimalan rincian output (RO), lebih teliti dalam menetapkan strategi pencapaian target kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan faktor lainnya seperti perubahan alokasi anggaran tahun berjalan. Meskipun penyusunan rencana pelaksanaan progam atau kegiatan telah dilakukan dengan cukup cermat, namun adanya automatic adjustment anggaran menyebabkan penyesuaian terhadap progam / kegiatan yang dilakukan oleh DPB, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian target kinerja yang sesuai anggaran setelah automatic adjustment. Dan dengan adanya pengoptimalan RO, pada triwulan 4 diharapkan pengoptimalan penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Untuk memudahkan dalam pemantauan kinerja, agar dari masing-masing indikator yang ditetapkan perlu adanya pemantauan pencapaian target secara periodik/triwulan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan perlunya dilakukannya tindakan preventif dengan pengoptimalan manajemen risiko sehingga setiap pelaksanaan program/kegiatan dari target kinerja per Indikator Kinerja dapat terpantau dengan baik. Dengan dilakukan tindakan proaktif menajemen risiko diharapkan pada akhir tahun anggaran capaian kinerja seluruh Indikator Kinerja dapat tercapai jauh melebihi dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Melalui Laporan kinerja Direktorat Perundingan Bilateral ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja yang telah di laksanakan oleh Direktorat Perundingan Bilateral selama periode tahun 2023. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja DPB ditahun tahun berikutnya, sehingga dapat diterapkan strategi dan tindakan preventif yang dapat meminimalisir dan bahkan menghilangkan faktor risiko yang dapat menyebabkan rendahnya capaian kinerja, serta secara umum diharapkan dapat memberi input yang positif bagi capaian kinerja Ditjen PPI dan capaian kinerja Kementerian Perdagangan yang juga menjadi bentuk tanggung jawab dalam penggunaan anggaran yang akuntabel.

Laporan Kinerja 2023

Presented by
Direktorat Perundingan Bilateral

Direktorat Perundingan Bilateral
Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
Kementerian Perdagangan
Jl. M.I.Ridwan Rais No. 5 Gambir
Jakarta Pusat
Gedung 2 Lt. 8
Telp.021-3442576
Email : ditperundinganbilateral@gmail.com